

## PROSEDUR PERPANJANGAN *SAFE MANNING CERTIFICATE* DALAM KELANCARAN OPERASIONAL KAPAL DI PT. BAHARI SAMUDERA INTI LINES PALEMBANG

Diah Nawang Wulan<sup>1</sup>, Puji Retno Ningrum<sup>2</sup>, Satria<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Sanz Magnatya

<sup>2</sup>Program Studi KPNP, Universitas Sanz Magnatya

Email korespondensi : diahnawanggw@gmail.com

### ABSTRAK

Keselamatan pelayaran merupakan prioritas utama yang bergantung pada kelaikan kapal dan pengawakan yang terampil. *Safe Manning Certificate* diterbitkan sebagai bukti bahwa kapal diawaki sesuai standar internasional. Penelitian ini bertujuan mengetahui prosedur perpanjangan *Safe Manning Certificate*, dokumen yang dibutuhkan, serta hambatan yang dihadapi di PT. Bahari Samudera Inti Lines Palembang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama Proyek Darat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpanjangan *Safe Manning Certificate* dilakukan secara daring melalui aplikasi SIMKAPEL, dimulai dari pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, pembayaran PNBPN, hingga penerbitan sertifikat. Dokumen yang diperlukan meliputi surat permohonan, ijazah awak kapal, *crew list* sertifikat kapal, dan *Safe Manning Certificate* lama. Dalam praktiknya, ditemukan hambatan seperti gangguan teknis pada SIMKAPEL, ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan dokumen, keterbatasan jumlah atau kualifikasi awak kapal, serta kurangnya koordinasi antara perusahaan dan instansi pelabuhan. Hambatan tersebut berdampak pada keterlambatan penerbitan sertifikat dan mengganggu kelancaran operasional kapal. Kesimpulannya, meskipun prosedur perpanjangan telah terstruktur dan mengikuti regulasi resmi, efektivitas pelaksanaan masih dipengaruhi oleh faktor teknis dan administratif. Perlu peningkatan stabilitas sistem, manajemen dokumen, serta koordinasi antar pihak untuk mendukung kelancaran proses perpanjangan *Safe Manning Certificate*.

**Kata Kunci:** Prosedur, Perpanjangan, *Safe Manning Certificate*, SIMKAPEL, Operasional Kapal.

### PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan posisi geografis yang sangat strategis, memiliki wilayah laut yang luas dan menjadi jalur pelayaran penting baik untuk perdagangan domestik maupun internasional. Perairan Indonesia yang dilalui jalur perdagangan

menjadikan kapal berperan vital sebagai moda transportasi utama yang menghubungkan berbagai wilayah. Moda ini mencakup pengangkutan di laut, sungai, dan danau, serta didukung oleh pelabuhan sebagai titik sandar, bongkar muat, naik turun penumpang, dan fasilitas keselamatan pelayaran lainnya

Pelabuhan juga berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan usaha, serta penghubung antar moda transportasi.

Keselamatan pelayaran merupakan aspek fundamental yang tidak dapat diabaikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang-undang ini menegaskan bahwa syarat keselamatan mencakup kelayakan teknis kapal serta kecakapan awak kapal. Awak kapal yang kompeten mampu mengantisipasi risiko navigasi seperti kandas, tabrakan, dan insiden lain di laut. Untuk memastikan hal tersebut, setiap kapal wajib memiliki *Safe Manning Certificate* yang menetapkan jumlah dan kualifikasi minimal awak kapal sesuai standar nasional dan internasional. Dokumen ini memastikan bahwa penempatan awak kapal mempertimbangkan tonase, konfigurasi permesinan, dan area pelayaran sesuai peraturan yang berlaku.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerbitan *Safe Manning Certificate* tidak lepas dari berbagai tantangan. Luturmas et al. (2022) mengungkapkan bahwa proses ini melibatkan tahapan administratif seperti pengajuan permohonan dan penyediaan dokumen, namun sering terkendala oleh keterbatasan fasilitas dan rendahnya pemahaman pengguna jasa.

Di PT. Bahari Samudera Inti Lines Palembang, perpanjangan *Safe Manning Certificate* dilaksanakan melalui aplikasi SIMKAPEL dengan tahapan mulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal dan awak, pengajuan permohonan resmi ke KUPP Kelas II Sungai Lumpur, hingga verifikasi dan penerbitan sertifikat. Dokumen yang dipersyaratkan meliputi surat ukur, surat laut atau pas besar, salinan *Safe Manning Certificate* lama, *crew list*, sertifikat keselamatan konstruksi kapal, dan sertifikat garis muat. Meski prosedur sudah mengikuti ketentuan resmi, pelaksanaannya sering menghadapi kendala seperti gangguan sistem SIMKAPEL, dokumen yang tidak sesuai, keterbatasan jumlah awak kapal yang memenuhi syarat, serta komunikasi yang kurang efektif antara perusahaan, awak kapal, dan instansi terkait. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya memperlambat proses administrasi, tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran operasional kapal. Dampaknya dapat berupa keterlambatan keberangkatan, terganggunya jadwal distribusi

barang, dan penurunan efisiensi kerja. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap prosedur perpanjangan *Safe Manning Certificate* beserta hambatan yang dihadapi menjadi penting untuk memberikan solusi yang dapat meningkatkan kelancaran proses, memperkuat koordinasi antar pihak terkait, dan mendukung keselamatan pelayaran secara berkelanjutan.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Prosedur Perpanjangan *Safe Manning Certificate* Dalam Kelancaran Operasional Kapal di PT. Bahari Samudera Inti Lines Palembang? (2) Apa saja dokumen yang dibutuhkan dalam Prosedur Perpanjangan *Safe Manning Certificate* Dalam Kelancaran Operasional Kapal di Pt. Bahari Samudera Inti Lines Palembang? (3) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam Prosedur Perpanjangan *Safe Manning Certificate* Dalam Kelancaran Operasional Kapal di Pt. Bahari Samudera Inti Lines Palembang?

Adapun tujuan penelitian ini: (1) Untuk mengetahui Prosedur Perpanjangan *Safe Manning Certificate* Dalam Kelancaran Operasional Kapal di PT. Bahari Samudera Inti Lines Palembang. (2) Untuk mengetahui dokumen-dokumen yang diperlukan dalam Prosedur Perpanjangan *Safe Manning Certificate* di PT. Bahari Samudera Inti Lines Palembang. (3) Agar mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam Prosedur Perpanjangan *Safe Manning Certificate* di PT. Bahari Samudera Inti Lines Palembang.

Manfaatnya secara teoritis, penelitian ini menambah literatur terkait prosedur administrasi kelautan. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi perusahaan dan pihak terkait untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses perpanjangan perpanjangan *safe manning certificate*.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan serangkaian tahapan kerja yang sistematis dan saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif. Menurut Rusdiana dan Zaqiah (2022) mendefinisikan prosedur sebagai rangkaian tata kerja yang menunjukkan urutan tahap demi tahap dalam penyelesaian tugas. Wahyuni Irawati dan Satri (2017) menekankan bahwa prosedur disusun

untuk menjamin keseragaman perlakuan dalam transaksi perusahaan yang melibatkan banyak pihak.

### **Pengertian Perpanjangan**

Perpanjangan adalah penambahan jangka waktu berlakunya suatu hak atau izin tanpa mengubah persyaratan yang ada. Berdasarkan PP No. 18 Tahun 2021, perpanjangan dilakukan untuk memperluas masa berlaku tanpa modifikasi ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **Pengertian Safe Manning Certificate**

Safe Manning Certificate adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang menetapkan jumlah dan kualifikasi minimal awak kapal sesuai ketentuan nasional dan internasional (Kemenhub, 2014).

Adapun menurut Luturmas et al. (2022) menegaskan bahwa Safe Manning Certificate merupakan salah satu syarat operasional kapal untuk menjamin keselamatan pelayaran. Sertifikat ini memuat informasi seperti nama kapal, tanda panggilan, nomor registrasi, nama perusahaan, wilayah pelayaran, jenis kapal, tonase kotor, daya mesin, jabatan awak kapal, serta tanggal dan tempat penerbitan.

### **Pengertian Operasional Kapal**

Operasional kapal mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian aktivitas pengoperasian kapal untuk mencapai efisiensi dan keselamatan (Mardiana, 2019).

Kegiatan ini meliputi persiapan sebelum berlayar (pemeriksaan dokumen, muatan, dan perlengkapan keselamatan), pelaksanaan pelayaran (navigasi, komunikasi, dan pengawasan muatan), serta aktivitas di pelabuhan (bongkar muat, pengisian bahan bakar, dan perawatan ringan). Tujuannya adalah menjamin keselamatan pelayaran, efisiensi perjalanan, dan kelancaran operasional bisnis pelayaran.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena bertujuan untuk menggambarkan secara langsung dan mendalam Prosedur Perpanjangan Safe Manning Certificate.

Sumber data penelitian ini yaitu menggunakan data primer yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari lokasi penelitian, pengambilan data dilakukan melalui observasi secara langsung, dan wawancara. Kemudian data sekunder merupakan informasi yang diperoleh peneliti melalui cara tidak langsung, data ini berbentuk dokumentasi atau arsip yang bersumber dari pihak lain contohnya seperti jurnal, buku-buku, atau publikasi lainnya. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam pengamatan atau penelitian, karena yang paling penting dari penelitian yaitu mendapatkan data. Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dari observasi secara langsung, wawancara dan studi pustaka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan selama kegiatan penelitian di PT. Bahari Samudera Inti Lines Palembang menunjukkan bahwa prosedur perpanjangan Safe Manning Certificate memegang peranan vital dalam memastikan kelancaran operasional kapal. Sertifikat ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk menjamin bahwa setiap kapal diawaki oleh jumlah dan kualifikasi personel sesuai standar keselamatan pelayaran nasional dan internasional. Tanpa sertifikat yang berlaku, kapal tidak diperkenankan beroperasi, sehingga proses perpanjangannya menjadi sangat penting bagi kontinuitas kegiatan pelayaran dan bisnis perusahaan.

### **Bagaimana Prosedur Perpanjangan Safe Manning Certificate di PT. Bahari Samudera Inti Lines Palembang.**

Proses perpanjangan Safe Manning Certificate di PT. Bahari Samudera Inti Lines Palembang telah mengikuti ketentuan resmi melalui sistem digital menggunakan aplikasi SIMKAPEL (Sistem Informasi Manajemen Kapal dan Pelaut). Tahapan pelaksanaan dimulai dengan pengajuan permohonan resmi dari perusahaan keagenan kapal kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Sungai Lumpur, yang kemudian disertai dengan pengunggahan dokumen persyaratan seperti surat ukur kapal,

surat laut atau pas besar, sertifikat keselamatan konstruksi, sertifikat safe manning lama, crew list, ijazah atau sertifikat awak kapal (COP dan COE), serta sertifikat garis muat (load line). Seluruh dokumen ini diverifikasi oleh petugas KSOP untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Apabila dokumen telah dinyatakan lengkap, perusahaan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan sertifikat yang baru diterbitkan serta disahkan kemudian diserahkan kembali kepada pihak kapal.

### **Hambatan yang sering dihadapi dalam Prosedur Perpanjangan Safe Manning Certificate**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur telah terstruktur dengan baik, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan dokumen dan kelancaran sistem SIMKAPEL. Di lapangan, masih ditemukan berbagai hambatan yang memperlambat proses, di antaranya adalah gangguan teknis pada aplikasi SIMKAPEL, koneksi internet yang tidak stabil, dokumen yang belum diperbarui atau tidak sesuai ketentuan, serta komunikasi yang kurang efektif antara perusahaan, nahkoda, pemilik kapal, dan pihak otoritas pelabuhan. Misalnya, peneliti menemukan beberapa kasus di mana ijazah awak kapal telah kedaluwarsa, surat permohonan tidak menggunakan kop perusahaan, atau billing PNBP belum dibayar sehingga permohonan ditolak sistem. Kendala-kendala ini memaksa staf untuk mengulang proses dari awal, mengakibatkan keterlambatan penerbitan sertifikat.

Selain hambatan teknis, penelitian ini juga menemukan permasalahan dalam manajemen internal perusahaan. Tidak adanya sistem pengingat masa berlaku dokumen dan lemahnya pengawasan internal membuat banyak dokumen tidak siap pada saat pengajuan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan bukan hanya pada sistem digital, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola persyaratan administrasi. Minimnya pemahaman terhadap alur dan persyaratan prosedur juga memperburuk situasi, sehingga koordinasi antar pihak yang terlibat menjadi kurang optimal. Akibatnya, beberapa kapal mengalami penundaan keberangkatan karena sertifikat belum terbit tepat

waktu, yang pada gilirannya berdampak pada jadwal pengiriman barang dan menurunkan kredibilitas perusahaan di mata pengguna jasa.

Berdasarkan temuan ini, peneliti menyimpulkan bahwa meskipun prosedur perpanjangan Safe Manning Certificate di PT. Bahari Samudera Inti Lines Palembang telah memenuhi ketentuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, penerapan di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan. Hambatan-hambatan yang ditemukan menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, baik dari segi teknis, manajerial, maupun koordinasi lintas instansi. Penguatan sistem manajemen dokumen, peningkatan kompetensi staf dalam mengoperasikan aplikasi SIMKAPEL, serta penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu penerbitan sertifikat. Dengan perbaikan ini, diharapkan kelancaran operasional kapal dapat terjamin, keterlambatan dapat diminimalkan, dan reputasi perusahaan di dunia pelayaran dapat terjaga dengan baik.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di PT. Bahari Samudera Inti Lines Palembang, dapat disimpulkan bahwa:

Prosedur Perpanjangan Safe Manning Certificate dilaksanakan melalui sistem daring menggunakan aplikasi SIMKAPEL sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Proses ini mencakup pengajuan permohonan resmi, pengunggahan dokumen persyaratan, verifikasi oleh petugas KSOP, pembayaran PNBP, hingga penerbitan sertifikat. Prosedur ini menjadi aspek penting dalam kelancaran operasional kapal karena tanpa sertifikat yang berlaku, kapal tidak diizinkan beroperasi.

Dokumen yang diperlukan meliputi surat permohonan resmi, surat ukur kapal, surat laut atau pas besar, sertifikat keselamatan konstruksi, sertifikat Safe Manning lama, crew list, ijazah atau sertifikat awak kapal (COP dan COE), serta sertifikat garis muat (Load Line). Kelengkapan dan keabsahan dokumen menjadi faktor penentu kelancaran proses perpanjangan.

Hambatan yang dihadapi antara lain gangguan teknis pada aplikasi SIMKAPEL, koneksi internet yang tidak stabil, dokumen yang tidak

lengkap atau sudah kedaluwarsa, serta kurangnya koordinasi antara pemilik kapal, nahkoda, agen kapal, dan pihak KSOP. Hambatan ini berdampak pada keterlambatan penerbitan sertifikat, yang dapat mengganggu jadwal keberangkatan kapal dan menurunkan kredibilitas perusahaan. Untuk mengatasinya, diperlukan peningkatan kesiapan teknis sistem, penguatan koordinasi antar pihak terkait, serta penerapan sistem pengingat masa berlaku dokumen agar proses perpanjangan lebih efisien dan minim kendala.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Kementerian Perhubungan. (2014). *Ketentuan Sertifikat Pengawakan (Safe Manning Certificate)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- Luturmas, F. B., Adham, M., Azhari, M. M. F., & KPNK, J. K. (2022). Penerbitan Safe Manning Certificate Sebagai Salah Satu Persyaratan Izin Operasional Kapal Pada Kupp Kelas Iii Sangkulirang. *Jurnal Maritim*, 12(1), 46-55.
- Mardiana, R. (2019). *Manajemen Operasional Kapal: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Maritim.
- Rusdiana, A., & Zaqiah, Q. Y. (2022). *Administrasi dan Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Wahyuni Irawati, N., & Satri, A. (2017). *Manajemen prosedur kerja*. Yogyakarta:Deepublish.

Halaman ini dikosongkan